

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI SEKOLAH (MERDEKA BELAJAR EPISODE 23) PADA SEKOLAH BERBASIS PONDOK DAN NEGERI: STUDI KOMPARATIF SMK PUTRI AL AZHAR DAN SMAN 2 PASURUAN

R. Amalia¹, Daryono², Mochamad Bayu Firmansyah³

^{1,2,3}Universitas PGRI Wiranegara

e-mail: robbiatulamalia2002@gmail.com¹, daryono.jarwo@gmail.com²,
firmansyahbayu970@gmail.com³

ABSTRAK

Kebijakan Merdeka Belajar Episode 23: Digitalisasi Sekolah dirancang untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Namun, implementasinya menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar sekolah, terutama antara sekolah berbasis pondok pesantren dan sekolah negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan digitalisasi sekolah di SMK Putri Al Azhar dan SMAN 2 Pasuruan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-komparatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi di SMK Putri Al Azhar masih terbatas karena regulasi pondok yang membatasi penggunaan gawai pribadi, minimnya fasilitas TIK, dan akses internet yang tidak merata. Sementara itu, SMAN 2 Pasuruan telah mengadopsi pembelajaran berbasis digital secara lebih optimal melalui penggunaan platform seperti *Quizizz*, *Google Drive*, dan *Canva*. Perbedaan implementasi kedua sekolah dipengaruhi oleh budaya sekolah, kebijakan internal, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan fasilitas TIK, pelatihan guru, dan strategi adaptasi kebijakan digital yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah.

Kata Kunci: *digitalisasi sekolah, Merdeka Belajar, implementasi kebijakan, sekolah pondok, sekolah negeri*

ABSTRACT

The Freedom to Learn Policy, Episode 23: School Digitalization, is designed to strengthen the use of technology in the learning process across all educational units. However, its implementation shows significant variation between schools, particularly between Islamic boarding schools and public schools. This study aims to analyze the implementation of the school digitalization policy at SMK Putri Al Azhar and SMAN 2 Pasuruan, and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The research method used is qualitative descriptive-comparative through interviews, observations, and documentation studies. The results show that digitalization at SMK Putri Al Azhar is still limited due to Islamic boarding school regulations that limit the use of personal devices, minimal ICT facilities, and uneven internet access. Meanwhile, SMAN 2 Pasuruan has adopted digital-based learning more optimally through the use of platforms such as *Quizizz*, *Google Drive*, and *Canva*. The differences in implementation between the two schools are influenced by school culture, internal policies, and the readiness of human resources and infrastructure. This study recommends the importance of strengthening ICT facilities, teacher training, and adapting digital policies strategies that are appropriate to the characteristics of each school.

Keywords: *school digitalization, Independent Learning, policy implementation, Islamic boarding schools, public schools*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa gelombang perubahan yang fundamental dalam berbagai sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada sektor pendidikan (Subagio & Limbong, 2023). Dalam lanskap global saat ini, digitalisasi telah bertransformasi menjadi tulang punggung sistem pendidikan modern, yang ditandai dengan integrasi masif perangkat *digital*, penggunaan *platform* pembelajaran *online*, serta penerapan sistem manajemen sekolah berbasis teknologi canggih. Perubahan paradigma ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengejar efisiensi administratif atau modernisasi tampilan fisik sekolah, melainkan memiliki tujuan substansial untuk membekali generasi penerus dengan kompetensi abad ke-21. Kompetensi tersebut meliputi literasi *digital* yang mumpuni, kemampuan berpikir kritis dalam memilah informasi, kreativitas tanpa batas, serta kemampuan kolaborasi lintas batas (Isma et al., 2022). Di Indonesia, urgensi transformasi ini semakin tidak terelakkan seiring dengan tuntutan zaman dan ekspektasi masyarakat yang menginginkan layanan pendidikan yang adaptif, responsif, dan relevan dengan dinamika dunia kerja masa depan yang serba terkomputerisasi. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan menjadi sebuah keniscayaan yang harus direspon dengan strategi yang matang dan berkelanjutan.

Jejak digitalisasi pendidikan di Indonesia sesungguhnya bukanlah fenomena yang benar-benar baru, melainkan sebuah evolusi panjang yang telah dimulai sejak awal era milenium. Pada awal tahun 2000-an, benih-benih digitalisasi mulai disemaikan melalui pengenalan laboratorium komputer di sekolah-sekolah, penggunaan perangkat multimedia seperti *PowerPoint*, hingga distribusi materi ajar melalui keping CD interaktif. Namun, pada fase awal ini, teknologi masih diposisikan sebagai suplemen atau pelengkap proses belajar mengajar semata. Akselerasi yang lebih sistemik mulai terlihat ketika pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif strategis seperti program *ICT for Education*, portal Rumah Belajar, dan pelatihan teknologi bagi tenaga pendidik (Nurkolis et al., 2024; Zamhari et al., 2023). Titik balik paling krusial terjadi ketika pandemi melanda dunia, memaksa seluruh ekosistem pendidikan untuk bermigrasi secara mendadak ke mode pembelajaran *online*. Peristiwa ini menjadi momentum penyadaran kolektif bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan bukan lagi sekadar opsi mewah, melainkan kebutuhan primer yang mendesak untuk menjaga keberlangsungan proses pencerdasan bangsa di tengah situasi krisis maupun normal.

Merespons dinamika pasca-pandemi yang menuntut pemulihan dan transformasi pembelajaran, pemerintah melalui kementerian terkait telah menggelontorkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat fondasi digitalisasi di satuan pendidikan (Syahrijar et al., 2023; Widiyono & Millati, 2021). Langkah konkret ini terwujud dalam distribusi bantuan perangkat keras seperti laptop *Chromebook*, subsidi kuota internet untuk akses pendidikan, hingga transformasi sistem evaluasi nasional menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Selain itu, peluncuran *Platform Merdeka Mengajar* menjadi tonggak penting dalam menyediakan ekosistem *digital* yang mendukung pengembangan kompetensi guru secara mandiri. Rangkaian kebijakan ini merupakan manifestasi dari keseriusan pemerintah dalam mendorong sekolah untuk mengadopsi teknologi, tidak hanya dalam urusan administrasi, tetapi juga dalam inti proses pedagogis. Filosofi kebijakan Merdeka Belajar secara eksplisit memberikan mandat kepada para pendidik untuk memanfaatkan teknologi *digital* guna merancang pengalaman belajar yang lebih kontekstual, memantik kreativitas siswa, dan menghadirkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik di era *digital native* saat ini (J & Andromeda, 2025; Pelu et al., 2025; Yunaini & Winingsih, 2022).

Meskipun arah kebijakan nasional telah digariskan dengan jelas, tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan adalah adanya disparitas atau kesenjangan yang nyata antar satuan pendidikan dengan latar belakang yang berbeda. Sekolah-sekolah negeri, terutama yang

berlokasi di wilayah urban, umumnya memiliki privilese berupa kesiapan infrastruktur yang lebih matang, kompetensi *digital* guru yang lebih terlatih, serta akses siswa terhadap gawai pribadi yang memadai. Kondisi yang kontras ditemukan pada lembaga pendidikan berbasis asrama atau pondok pesantren. Institusi pendidikan khas Indonesia ini menghadapi tantangan unik dan berlapis, mulai dari keterbatasan infrastruktur jaringan hingga regulasi internal yang ketat mengenai kepemilikan perangkat elektronik. Banyak pesantren menerapkan aturan larangan penggunaan *gadget* atau telepon genggam bagi para santri demi menjaga kedisiplinan, fokus menghafal kitab, dan meminimalisir pengaruh negatif konten dunia maya. Benturan antara tuntutan digitalisasi global dan nilai-nilai protektif pesantren ini menciptakan dinamika tersendiri yang memengaruhi strategi adopsi teknologi yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.

Studi kasus yang menarik untuk memotret fenomena disparitas ini dapat dilihat dari perbandingan antara SMK Putri Al Azhar yang berbasis pesantren dengan SMAN 2 Pasuruan yang berstatus sekolah negeri. SMK Putri Al Azhar memiliki karakteristik ekosistem pendidikan yang unik, di mana pembatasan akses terhadap *gadget* pribadi siswa menjadi norma yang harus dipatuhi. Akibatnya, implementasi digitalisasi pembelajaran sangat bergantung pada fasilitas komunal yang disediakan institusi, seperti laboratorium komputer terpusat atau penggunaan laptop inventaris guru di kelas. Sebaliknya, SMAN 2 Pasuruan menikmati fleksibilitas yang jauh lebih luas dalam mengadopsi ekosistem *digital*. Baik guru maupun siswa memiliki kebebasan untuk membawa dan menggunakan perangkat pribadi (*Bring Your Own Device*), sehingga pemanfaatan aplikasi seperti *Google Classroom*, *Quizizz*, desain grafis via *Canva*, hingga referensi video *YouTube* dapat dilakukan secara leluasa dan terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan mendasar dalam aksesibilitas ini tentu melahirkan pola interaksi pembelajaran berbasis teknologi yang sangat berbeda di antara kedua institusi tersebut.

Perbedaan karakteristik yang mencolok antara kedua tipe institusi pendidikan ini menegaskan sebuah hipotesis bahwa digitalisasi pendidikan tidak dapat dipaksakan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua (*one size fits all*) (Ratnawati et al., 2025). Konteks budaya, regulasi internal, dan kesiapan infrastruktur institusi memegang peranan vital dalam menentukan keberhasilan transformasi *digital*. Sekolah yang telah memiliki budaya teknologi yang mapan tentu akan lebih lincah dalam beradaptasi dibandingkan dengan sekolah yang memiliki restriksi regulasi tertentu. Secara teoritis, integrasi teknologi digital memang terbukti mampu mendongkrak motivasi belajar, mendorong partisipasi aktif siswa, dan memperkaya metode pengajaran. Namun, di sisi lain, hambatan seperti kesenjangan literasi *digital* di kalangan guru senior, ketergantungan pada stabilitas koneksi internet, serta resistensi kultural terhadap perubahan juga menjadi faktor penghambat yang nyata. Oleh karena itu, sebuah kajian komparatif yang mendalam sangat diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan digitalisasi nasional diterjemahkan ke dalam praktik nyata di dua ekosistem pendidikan yang memiliki perbedaan fundamental tersebut.

Berangkat dari latar belakang permasalahan, dinamika kebijakan, dan tinjauan teoritis tersebut, penelitian ini memiliki urgensi dan nilai kebaruan (*novelty*) yang signifikan. Pertama, literatur mengenai implementasi digitalisasi di lingkungan sekolah berbasis pesantren masih relatif minim jika dibandingkan dengan studi pada sekolah umum, sehingga penelitian ini akan mengisi kekosongan akademis tersebut. Kedua, pendekatan komparatif antara sekolah negeri dan sekolah berbasis pesantren akan memberikan potret komprehensif mengenai wajah ganda digitalisasi pendidikan di Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Ketiga, hasil dari analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, akurat, dan kontekstual bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan secara rinci potret implementasi kebijakan digitalisasi di SMK Putri Al Azhar dan SMAN 2 Pasuruan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menganalisis perbedaan mendasar dalam penerapan teknologi pendidikan di kedua institusi tersebut demi perbaikan kualitas pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menyelidiki secara mendalam fenomena implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan di dua institusi dengan karakteristik yang berbeda. Lokasi penelitian ditetapkan pada SMK Putri Al Azhar sebagai representasi sekolah berbasis pondok pesantren dan SMAN 2 Pasuruan sebagai representasi sekolah negeri. Pendekatan ini dipilih secara strategis karena kemampuannya dalam memberikan gambaran yang komprehensif, faktual, dan holistik mengenai dinamika penerapan kebijakan *Merdeka Belajar* Episode 23 dalam konteks budaya sekolah yang kontras. Fokus utama studi diarahkan pada analisis komparasi proses adopsi teknologi, strategi pedagogis guru, serta kendala struktural dan kultural yang dihadapi masing-masing sekolah. Melalui desain komparatif ini, peneliti berupaya membedah bagaimana regulasi nasional diterjemahkan ke dalam praktik lokal yang unik, serta mengidentifikasi pola-pola adaptasi yang dilakukan oleh masing-masing institusi dalam merespons tantangan transformasi digital tanpa melakukan intervensi terhadap subjek yang diteliti.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang intensif guna menjamin validitas dan kekayaan informasi. Teknik pertama adalah wawancara *semi-terstruktur* yang dilakukan dengan informan kunci, meliputi kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan, guru mata pelajaran sebagai pelaksana teknis, dan siswa sebagai penerima manfaat program. Instrumen pedoman wawancara digunakan untuk menggali perspektif subjektif partisipan mengenai efektivitas penggunaan platform digital, ketersediaan akses, serta hambatan operasional sehari-hari. Selain itu, peneliti melakukan observasi partisipatif di ruang kelas dan laboratorium komputer untuk mengamati secara langsung interaksi pembelajaran, frekuensi penggunaan perangkat TIK, dan atmosfer akademik yang terbangun. Langkah ini diperkuat dengan studi dokumentasi terhadap arsip sekolah, seperti dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan teknologi, regulasi internal pondok terkait gawai, serta inventaris sarana prasarana digital. Penggunaan beragam teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang saling melengkapi dan meminimalkan bias interpretasi peneliti (Subagio & Limbong, 2023).

Analisis data dilaksanakan secara sistematis menggunakan teknik analisis tematik yang mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti melakukan seleksi ketat, penyederhanaan, dan pengkodean data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan. Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti "kebijakan akses perangkat", "kompetensi digital guru", dan "kultur pembelajaran". Selanjutnya, dilakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi perbandingan untuk memetakan persamaan dan perbedaan pola implementasi digitalisasi di kedua sekolah. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah. Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, serta triangulasi metode dengan mengecek konsistensi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Proses analisis yang ketat ini memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan memiliki kredibilitas ilmiah yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan (Nurkolis et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Kebijakan Digitalisasi di SMK Putri Al Azhar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan digitalisasi pendidikan di SMK Putri Al Azhar berjalan dengan pola yang unik dan terbatas, sangat dipengaruhi oleh karakteristik institusi sebagai sekolah yang terintegrasi dengan lingkungan pondok pesantren. Kebijakan internal yang melarang siswa membawa telepon genggam pribadi atau gawai pintar ke lingkungan asrama dan sekolah menjadi faktor determinan utama yang membentuk model digitalisasi di sekolah ini. Akibatnya, ekosistem pembelajaran digital tidak dapat berjalan secara mandiri dan *mobile*, melainkan sangat bergantung pada infrastruktur terpusat yang disediakan oleh sekolah. Proses transfer pengetahuan berbasis teknologi hanya dapat terjadi ketika siswa berada di dalam laboratorium komputer atau ketika guru menggunakan laptop dan proyektor di dalam kelas. Dalam konteks ini, teknologi lebih banyak difungsikan sebagai alat bantu visual bagi guru untuk menyampaikan materi, seperti menayangkan slide presentasi PowerPoint atau memutar video pembelajaran, daripada sebagai alat eksplorasi mandiri oleh siswa.



Gambar 1. Penerapan Digitalisasi di SMK Putri Al Azhar

Keterbatasan akses terhadap perangkat pribadi ini membawa implikasi signifikan terhadap jenis platform digital yang dapat diadopsi dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Aplikasi manajemen pembelajaran berbasis internet yang membutuhkan akses berkelanjutan, seperti Google Classroom, Quizizz, atau grup diskusi daring, belum dapat diterapkan secara optimal karena siswa tidak memiliki akses digital di luar jam sekolah. Interaksi digital terputus begitu siswa meninggalkan ruang kelas atau laboratorium. Meskipun menghadapi kendala struktural dan regulasi yang ketat tersebut, para guru di SMK Putri Al Azhar tetap menunjukkan upaya adaptif yang positif. Mereka secara rutin mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi digital dan berusaha memaksimalkan fasilitas laboratorium untuk kegiatan-kegiatan krusial seperti ujian berbasis komputer atau praktik mata pelajaran kejuruan yang menuntut keterampilan teknis. Digitalisasi di sekolah ini, dengan demikian, dapat didefinisikan sebagai digitalisasi yang bersifat selektif dan terkendali, di mana teknologi dihadirkan namun tetap dalam koridor pengawasan ketat nilai-nilai kepesantrenan.

2. Implementasi Kebijakan Digitalisasi di SMAN 2 Pasuruan

Berbeda dengan lokasi penelitian pertama, hasil temuan di SMAN 2 Pasuruan menggambarkan lanskap implementasi digitalisasi pendidikan yang jauh lebih komprehensif, terbuka, dan terintegrasi secara penuh dalam budaya sekolah. Di sekolah ini, digitalisasi bukan lagi sekadar wacana atau program tambahan, melainkan telah menjadi denyut nadi utama dalam proses pembelajaran harian. Guru dan siswa memiliki keleluasaan akses terhadap teknologi, didukung oleh kebijakan sekolah yang mengizinkan penggunaan perangkat pribadi seperti laptop dan telepon pintar untuk kepentingan edukasi. Hal ini mendorong penggunaan aplikasi

Copyright (c) 2025 EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

pembelajaran yang variatif dan interaktif, mulai dari pengelolaan tugas melalui Google Drive, evaluasi seru menggunakan Quizizz, hingga pembuatan konten kreatif menggunakan Canva. Siswa di SMAN 2 Pasuruan tidak hanya diposisikan sebagai konsumen materi digital, tetapi didorong menjadi produsen konten aktif yang mampu membuat infografis, video presentasi, dan poster digital sebagai bentuk penugasan yang modern.



Gambar 1. Penerapan Digitalisasi di SMAN 2 Pasuruan

Keberhasilan implementasi di SMAN 2 Pasuruan juga sangat ditopang oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital warga sekolah yang sudah terbangun matang. Ketersediaan jaringan internet yang stabil di seluruh area sekolah memungkinkan pembelajaran *blended learning* atau campuran antara metode tatap muka konvensional dengan integrasi teknologi berjalan mulus tanpa hambatan teknis yang berarti. Selain itu, program nasional seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang telah dilaksanakan secara rutin selama beberapa tahun terakhir turut mempercepat adaptasi teknis baik bagi guru maupun siswa. Observasi kelas memperlihatkan bahwa mayoritas guru telah memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni, mampu mengoperasikan berbagai perangkat lunak pembelajaran dengan lancar. Meskipun demikian, variasi kualitas pembelajaran digital masih terlihat, di mana tingkat kecanggihan dan interaktivitas media yang digunakan sangat bergantung pada kreativitas dan inovasi individual masing-masing guru dalam meramu materi ajar.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Institusional

Analisis terhadap faktor pendukung di kedua sekolah memperlihatkan dua sisi mata uang yang berbeda namun sama-sama krusial dalam menopang jalannya digitalisasi. Di SMAN 2 Pasuruan, faktor pendukung utama bersifat teknis dan fasilitas; ketersediaan perangkat pribadi siswa (*Bring Your Own Device*), akses Wi-Fi yang kencang, dan kelengkapan sarana multimedia di setiap kelas menjadi tulang punggung utama keberhasilan program. Sementara itu, di SMK Putri Al Azhar, faktor pendukung lebih bersifat motivasional dan manajerial. Meskipun fasilitas terbatas pada laboratorium, semangat guru untuk tetap menghadirkan nuansa teknologi di tengah keterbatasan menjadi modal sosial yang penting. Dukungan kebijakan sekolah yang tetap mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan laboratorium komputer dan pengadaan pelatihan guru menunjukkan komitmen institusi untuk tidak tertinggal zaman, meskipun harus berjalan perlahan demi menyeimbangkan modernitas dengan tradisi pesantren yang dijunjung tinggi.

Di sisi lain, faktor penghambat yang teridentifikasi juga memiliki karakteristik yang kontras antara kedua institusi pendidikan tersebut. Hambatan terbesar di SMK Putri Al Azhar adalah regulasi internal pesantren yang membatasi akses gawai, yang secara otomatis memangkas kesempatan siswa untuk melakukan eksplorasi digital secara mandiri dan fleksibel di luar jam pelajaran. Hal ini menyebabkan literasi digital siswa cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan siswa sekolah umum. Sebaliknya, tantangan di SMAN 2 Pasuruan bukan pada akses atau alat, melainkan pada aspek sumber daya manusia. Ditemukan adanya kesenjangan kompetensi dan kemauan beradaptasi di antara para guru. Sebagian guru senior masih merasa

lebih nyaman dengan metode pengajaran tradisional dan menganggap teknologi sebagai beban tambahan, sehingga penerapan digitalisasi belum merata sepenuhnya di semua mata pelajaran, menciptakan disparitas pengalaman belajar bagi siswa.

4. Komparasi Model Implementasi Digitalisasi Antar Sekolah

Perbandingan mendalam antara SMK Putri Al Azhar dan SMAN 2 Pasuruan menyingkap adanya dikotomi model implementasi digitalisasi yang sangat tajam, yang berakar pada perbedaan visi dan lingkungan sekolah. SMAN 2 Pasuruan merepresentasikan model "Digitalisasi Terbuka dan Partisipatif", di mana teknologi diadopsi secara luas, fleksibel, dan melibatkan partisipasi aktif siswa melalui perangkat pribadi mereka. Model ini memungkinkan terjadinya akselerasi kompetensi digital yang cepat karena siswa terpapar teknologi secara intensif baik di sekolah maupun di rumah. Sebaliknya, SMK Putri Al Azhar menerapkan model "Digitalisasi Terpusat dan Terproteksi". Dalam model ini, interaksi digital dikendalikan penuh oleh otoritas sekolah melalui fasilitas bersama, membatasi otonomi siswa namun menjamin keamanan konten dan kepatuhan terhadap norma pesantren. Perbedaan mendasar ini terletak pada filosofi penggunaan teknologi: satu memandangnya sebagai alat personal yang membebaskan, sementara yang lain memandangnya sebagai fasilitas komunal yang perlu diawasi.

Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam pendekatan dan eksekusi, kedua sekolah sesungguhnya berada pada trajektori yang sama dalam upaya merespons tuntutan zaman. Keduanya sama-sama menyadari bahwa penguasaan teknologi adalah kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh lulusan mereka di masa depan. Perbedaan implementasi yang terjadi hanyalah bentuk penyesuaian strategis terhadap konteks sosiokultural masing-masing lembaga. SMAN 2 Pasuruan fokus pada kecepatan dan kreativitas inovasi digital, sementara SMK Putri Al Azhar fokus pada integrasi teknologi yang santun dan selaras dengan nilai agama. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada model tunggal dalam digitalisasi pendidikan; keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam menyelaraskan kemajuan teknologi dengan budaya, fasilitas, dan regulasi internal yang berlaku di lingkungan masing-masing.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek	SMK Putri Al Azhar (Berbasis Pondok)	SMAN 2 Pasuruan (Sekolah Negeri)
Akses perangkat	Terbatas, siswa tidak memiliki HP	Bebas, siswa memiliki HP/laptop
Platform digital	PPT, video, laboratorium komputer	<i>Google Drive, Quizizz, Canva, YouTube</i>
Internet	Terbatas dan diawasi	Stabil dan terbuka
Kebijakan sekolah	Pembatasan HP, fokus kontrol perilaku	Mendukung digitalisasi penuh
Model penggunaan teknologi	Bersifat demonstratif oleh guru	Bersifat partisipatif, kreatif, dan kolaboratif
Kesiapan guru	Cukup, namun terbatas praktik	Tinggi dan merata

Berdasarkan tabel 1 hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi digitalisasi sangat dipengaruhi oleh konteks sekolah, terutama kebijakan internal dan kesiapan infrastruktur. Meskipun berbeda, kedua sekolah tetap berupaya mengadopsi digitalisasi sesuai kemampuan dan karakter masing-masing.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan digitalisasi di SMK Putri Al Azhar menunjukkan adanya fenomena adaptasi teknologi yang sangat dipengaruhi oleh ekosistem pondok pesantren. Kebijakan internal yang membatasi kepemilikan gawai pribadi atau *gadget* bagi siswa asrama menjadi variabel utama yang membentuk pola digitalisasi yang bersifat terpusat dan terkendali. Dalam lingkungan ini, teknologi tidak berfungsi sebagai alat personal yang melekat pada siswa, melainkan sebagai fasilitas komunal yang aksesnya diatur secara ketat melalui laboratorium komputer atau media presentasi guru di kelas. Kondisi ini menciptakan model pembelajaran yang cenderung *teacher-centered*, di mana guru memegang kendali penuh atas arus informasi digital. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai kegagalan modernisasi, melainkan sebuah strategi kompromi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kompetensi teknis dengan pelestarian nilai-nilai moral pesantren. Sekolah membuktikan bahwa di tengah restriksi akses, transfer pengetahuan teknologi tetap dapat berjalan melalui optimalisasi infrastruktur yang tersedia dan peningkatan kapasitas instruksional guru (Arini et al., 2025; Hamilaturroyya & Adibah, 2025).

Berbeda secara diametral dengan lokasi pertama, SMAN 2 Pasuruan merepresentasikan model implementasi digitalisasi yang terbuka dan partisipatif, didukung oleh ekosistem sekolah negeri yang lebih fleksibel. Kebijakan yang mengizinkan siswa membawa perangkat pribadi atau *Bring Your Own Device* (BYOD) telah mengubah lanskap pembelajaran menjadi sangat dinamis dan interaktif. Di sekolah ini, digitalisasi telah melampaui tahap pengenalan alat dan masuk pada tahap integrasi kurikulum yang mendalam. Siswa tidak hanya ditempatkan sebagai konsumen materi digital, tetapi didorong menjadi produsen konten kreatif melalui pemanfaatan berbagai platform seperti *Canva*, *Google Drive*, dan media sosial. Kebebasan akses internet yang stabil memungkinkan terjadinya *blended learning* yang efektif, di mana batasan antara pembelajaran di dalam dan luar kelas menjadi kabur. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika hambatan regulasi diminimalkan dan dukungan infrastruktur dimaksimalkan, akselerasi literasi digital siswa dapat terjadi secara organik dan masif (Firdaus et al., 2025; Ratnawati et al., 2025).

Perbandingan antara kedua institusi pendidikan ini menyingkap adanya dikotomi tajam dalam pendekatan digitalisasi pendidikan di Indonesia. SMAN 2 Pasuruan mencerminkan pendekatan teknokratis yang menekankan pada efisiensi, kecepatan akses, dan inovasi individu, sementara SMK Putri Al Azhar mencerminkan pendekatan proteksionis yang menekankan pada keamanan konten dan kepatuhan norma. Perbedaan ini menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan bukanlah konsep tunggal yang dapat diterapkan secara seragam atau *one size fits all*. Konteks institusional, yang mencakup visi sekolah, budaya organisasi, dan nilai dasar yang dianut, memegang peranan vital dalam menentukan bentuk operasional teknologi di lapangan. Kedua sekolah, dengan caranya masing-masing, berupaya merespons tuntutan zaman; satu dengan cara berlari cepat memanfaatkan keterbukaan, dan yang lain berjalan hati-hati meniti jembatan antara tradisi dan modernitas (Darmawan & Syamsiah, 2025; Zaenuddin et al., 2025).

Analisis faktor pendukung dan penghambat menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kesiapan manusia. Di SMAN 2 Pasuruan, faktor pendukung utama adalah infrastruktur fisik dan kebijakan yang permisif, namun tantangan muncul dari disparitas kompetensi guru senior yang terkadang lambat beradaptasi dengan *tools* baru. Sebaliknya, di SMK Putri Al Azhar, tantangan utama bukanlah pada sumber daya manusia, melainkan pada hambatan struktural regulasi pesantren yang membatasi jam terbang siswa dalam mengeksplorasi dunia digital secara mandiri. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan literasi digital atau *digital divide* antara siswa di sekolah umum dengan siswa di sekolah berbasis asrama. Temuan ini

mengimplikasikan bahwa penyediaan alat canggih saja tidak cukup; diperlukan strategi manajemen perubahan yang mampu mengatasi hambatan kultural di satu sisi dan hambatan kompetensi di sisi lain (Asrofi et al., 2025; Suardiani et al., 2025).

Ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan, temuan penelitian ini memvalidasi pandangan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan instruksi dari pusat, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. SMAN 2 Pasuruan memiliki lingkungan yang kondusif dengan dukungan penuh dari ekosistem digital yang matang, sehingga implementasi kebijakan berjalan linier dengan harapan pemerintah. Sementara itu, SMK Putri Al Azhar harus melakukan negosiasi ulang terhadap kebijakan digitalisasi agar tidak berbenturan dengan aturan pesantren. Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi kebijakan di tingkat lokal atau *local adaptation*. Sekolah melakukan modifikasi strategi—dari penggunaan gawai pribadi menjadi penggunaan laboratorium—untuk tetap mencapai tujuan pembelajaran tanpa melanggar prinsip dasar institusi. Ini membuktikan bahwa sekolah memiliki agensi untuk menerjemahkan kebijakan makro ke dalam praktik mikro yang kontekstual.

Implikasi praktis dari penelitian ini menuntut adanya diversifikasi strategi dalam kebijakan digitalisasi pendidikan nasional. Pemerintah tidak dapat sekadar memberikan bantuan perangkat keras tanpa memahami restriksi budaya yang ada di sekolah-sekolah berbasis keagamaan atau asrama. Bagi sekolah seperti SMK Putri Al Azhar, dukungan yang dibutuhkan bukan sekadar laptop, melainkan model kurikulum digital yang *offline-friendly* atau sistem intranet lokal yang aman namun kaya konten. Sedangkan bagi sekolah seperti SMAN 2 Pasuruan, fokus kebijakan harus diarahkan pada standardisasi kompetensi guru dan keamanan siber atau *cybersecurity* mengingat tingginya eksposur siswa terhadap internet terbuka. Pengakuan terhadap keberagaman model implementasi ini penting agar intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan inklusif, tidak meninggalkan kelompok siswa tertentu dalam arus transformasi digital yang cepat.

Sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pendidikan adalah fenomena multidimensi yang melibatkan aspek teknis, kultural, dan regulasi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup subjek yang hanya mencakup dua sekolah dengan karakteristik kontras, sehingga generalisasi temuan harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan lebih memotret dinamika proses daripada mengukur dampak kuantitatif terhadap prestasi siswa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan pada variasi tipe sekolah lain dan menggunakan metode campuran untuk mengukur efektivitas *output* pembelajaran. Meskipun demikian, studi ini memberikan kontribusi penting dalam memetakan realitas lapangan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang humanis dan kontekstual, menghormati nilai lokal sembari tetap membuka wawasan global bagi peserta didik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan tidak berjalan seragam melainkan sangat bergantung pada ekosistem kelembagaan, sebagaimana terlihat dari perbedaan signifikan antara SMAN 2 Pasuruan dan SMK Putri Al Azhar. SMAN 2 Pasuruan berhasil menerapkan digitalisasi secara optimal berkat dukungan infrastruktur yang memadai, akses internet stabil, tingginya literasi digital guru, serta kebijakan sekolah yang terbuka terhadap integrasi teknologi. Sebaliknya, SMK Putri Al Azhar menerapkan strategi digitalisasi yang lebih selektif dan terbatas sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pondok pesantren yang membatasi penggunaan gawai pribadi siswa demi menjaga kultur santri. Temuan ini menegaskan bahwa faktor determinan keberhasilan tidak hanya

Copyright (c) 2025 EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

terletak pada ketersediaan perangkat keras, tetapi juga pada keselarasan antara adopsi teknologi dengan regulasi internal serta budaya sekolah. Kesenjangan akses dan perbedaan aturan main ini menunjukkan bahwa setiap institusi memiliki tantangan unik yang menuntut pendekatan manajerial spesifik dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke level operasional.

Secara teoritis dan praktis, studi ini memberikan kontribusi penting dengan membuktikan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, menolak asumsi bahwa satu strategi dapat diterapkan untuk semua jenis sekolah. Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang menempatkan faktor lingkungan sosial dan karakteristik organisasi sebagai variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan program. Implikasinya, pembuat kebijakan tidak dapat sekadar memaksakan standar teknis yang kaku, tetapi harus memberikan ruang otonomi bagi satuan pendidikan untuk merancang peta jalan digitalisasi yang adaptif sesuai dengan nilai, aturan, dan kesiapan sumber daya masing-masing. Digitalisasi di sekolah berbasis pesantren memerlukan model yang menghormati batasan religius, sementara sekolah umum dapat didorong untuk akselerasi penuh. Dengan demikian, transformasi pendidikan dapat berjalan efektif secara inklusif tanpa menggerus identitas lokal maupun kearifan institusional yang menjadi ciri khas setiap satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, A., Ratnawati, E., Komariyah, L., Subagiyo, L., & Warman, W. (2025). Evaluasi manajemen pendidikan di madrasah negeri di Kalimantan Timur: Peran sistem informasi dalam penjaminan mutu pendidikan. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 446. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5726>
- Asrofi, A., Islah, A. N., & Hadi, I. A. (2025). Ihwal pendidikan di era modern: Pendidikan karakter dan pembelajaran di era industri. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 486. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.4858>
- Darmawan, A., & Syamsiah, S. (2025). Literasi digital bagi guru RA Daarul Wahdah melalui pemanfaatan Prezi untuk media pembelajaran interaktif. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 692. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7576>
- Firdaus, F., Wahidin, W., Ramdani, D., Hernawati, D., & Badriah, L. (2025). Profil keterampilan literasi digital peserta didik dalam pembelajaran IPA. *Science: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 4(4), 697. <https://doi.org/10.51878/science.v4i4.4252>
- Hamilaturroyya, H., & Adibah, I. Z. (2025). Dinamika pengembangan kurikulum di era digital dalam menjawab kesenjangan konsep dan praktik. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1245. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631>
- Isma, C. N., Rahmi, R., & Jamin, H. (2022). Urgensi digitalisasi pendidikan sekolah. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 129. <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1317>
- J, N. M., & Andromeda, A. (2025). Validitas dan praktikalitas media video pembelajaran laju reaksi pada platform YouTube untuk meningkatkan kemampuan literasi kimia siswa. *Science: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 5(4), 1793. <https://doi.org/10.51878/science.v5i4.7550>

- Nurkolis, N., Muhdi, M., Maryant, M., & Kusumaningsih, W. (2024). Various factors that influence the successful implementation of school digitalization policies. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i6.15270>
- Pelu, H., Naw, R., & Sadiq, A. I. (2025). Widyaiswara menyampaikan materi pembelajaran berbasis ambidextery pada pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Makassar. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1278. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.7266>
- Ratnawati, E., Kristiyani, N., Warman, W., Bahzar, M., & Nurlaili, N. (2025). Transformasi digital di sekolah negeri pesisir: Kajian aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada implementasi Google for Education di SMP Negeri 1 Anggana. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1288. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.7315>
- Suardiani, N. P., Lasmawan, I. W., & Kertih, I. W. (2025). Analisis kesenjangan antara ekspektasi dan realitas dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar: Pendekatan studi kasus. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 651. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4463>
- Subagio, I., & Limbong, A. M. (2023). Dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap aktivitas pendidikan. *The Journal of Learning and Technology*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.33830/jlt.v2i1.5844>
- Syahrijar, I., Supriadi, U., & Fakhruddin, A. (2023). Upaya meningkatkan mutu pembelajaran PAI melalui pembelajaran berbasis digital (Studi eksploratif di SMA Negeri 15 dan SMA Alfa Centauri Kota Bandung). *Journal on Education*, 5(4), 13766. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2389>
- Widiyono, A., & Millati, I. (2021). Peran teknologi pendidikan dalam perspektif Merdeka Belajar di era 4.0. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.63>
- Yunaini, N., & Winingsih, D. Y. (2022). Implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran di sekolah dasar. *Cendekiawan*, 4(2), 78. <https://doi.org/10.35438/cendekiawan.v4i2.257>
- Zaenuddin, Z., Citriadin, Y., Ismail, I., & Khalqi, K. (2025). Manajemen strategik kepala sekolah di SMP Islam Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1248. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6893>
- Zamhari, Z., Noviani, D., & Zainuddin, Z. (2023). Perkembangan pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 1(5), 1. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i5.42>